

Dokumen Pemilihan

(DOKUMEN KUALIFIKASI)

**Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi
Badan Usaha**

Metode Penunjukan Langsung

BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-Sign) di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2 b. Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Mina Bahari I Lantai 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat c. Website LPSE: https://spse.inaproc.id/kkp
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2 b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: 1. Pengendalian dan Asistensi penyelesaian pekerjaan konstruksi Tahap 1 (transisi); 2. Tahap review Rancangan DED; 3. Tahap Pembangunan Konstruksi; 4. Pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan konstruksi sd serah terima pertama; 5. Konsultansi. c. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: Lama waktu pelaksanaan Tahap 1 lanjutan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dan lama waktu Tahap 2 adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah SPMK
C. Sumber Dana	2	1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: ABT yang tertuang dalam DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2. Pagu Anggaran: Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah)

		3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp8.994.923.107,50 (Delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh koma lima rupiah)
D. Jumlah anggota KSO	3.14	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO): Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak _____ perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; <i>[diisi 3 (tiga) untuk pekerjaan tidak kompleks atau 5 (lima) untuk pekerjaan kompleks, dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan]</i>
E. Persyaratan Kualifikasi	13.2	A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas: 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha: a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi; 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); 2) Dalam hal Sertifikat Standar Sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017). b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002) kode KBLI 71102 dan Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK001) Kode KBLI 71102. 2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. 3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa apabila dikuasakan;

		c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. 4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi: a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi: a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
--	--	--

		h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota KSO bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam hal Peserta melakukan KSO harus mempunyai perjanjian KSO. B. Syarat Kualifikasi Teknis: - memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; - memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Jasa Manajemen Konstruksi/Proyek Terkait Konstruksi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air kode RK002; - memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yang terkait Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Irigasi/ Bendungan/ Waduk/Embung/Tambak dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; Dalam hal peserta melakukan KSO, maka: - setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada poin A, kecuali angka 1 huruf b. - Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf b dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
	13.4.b	Data kualifikasi yang diunggah (<i>upload</i>) pada fasilitas pengunggahan lain: - Surat Perjanjian KSO (jika ada) - Data Kualifikasi anggota KSO (jika ada)

		3. Pakta Integritas; 4. Bukti Pengalaman Perusahaan (Kontrak & BAST/Bukti Potong Pajak/Bukti Pembayaran) [<i>contoh: Surat Perjanjian KSO, dll</i>]
--	--	---